

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD),  
DANA PERIMBANGAN DAN BELANJA MODAL  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH  
DAERAH KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI  
SUMATERA SELATAN**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Dari Syarat-Syarat  
Guna Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi



**Diajukan Oleh :**

**SARI YULIAWATI**

**NPM. 2201120511.P**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS TRIDINANTI  
2024**


UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : Sari Yulawati  
Nomor Pokok/NPM : 2201120511.P  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Pembimbing Skripsi :

Tanggal 02/10/2024 Pembimbing I : .....

  
Meti Zulyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205056701


Tanggal 02/10/2024 Pembimbing II : .....

  
Sasiska Rani, SE., M.Si.  
NIDN. 0222039102

Mengetahui,

Dekan



  
Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205026401

Tanggal :

Ketua Program Studi



Meti Zulyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205056701

Tanggal :

UNIVERSITAS TRIDINANTI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Sari Yuliatwati  
Nomor Pokok/NPM : 2201120511.P  
Jurusan/Prog. Studi : Akuntansi  
Jenjang Pendidikan : Strata 1  
Konsentrasi : Akuntansi Sektor Publik  
Judul Skripsi : Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Penguji Skripsi :

Tanggal 02/10/2024 Ketua Penguji



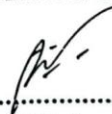
.....  
Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205056701

Tanggal 02/10/2024 Penguji I



.....  
Sasiska Rani, SE., M.Si.  
NIDN. 0222039102

Tanggal 02/10/2024 Penguji II




.....  
Pipit Fitri Rahayu, SE., M.Si.  
NIDN. 0210049001

Mengetahui,

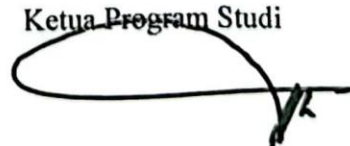
Dekan



  
Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205026401

Tanggal :

Ketua Program Studi



Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS  
NIDN. 0205056701

Tanggal :

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### Motto :

“Akan ada satu masa dalam hidup seseorang meresahkan satu persoalan, yang seakan-akan beban berat dipikul sampai merasa kesulitan dari ujung kepala sampai ujung kaki siapapun itu. Kalo ada yang sedang merasakan itu yakinlah kata Allah pada saat itu Allah sedang mengangkat derajatnya dan meningkatkan kualitas hidupnya untuk mencapai sesuatu istimewa yang belum pernah diraih”.

*“Allah tidak akan membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya”.*

~(Q.S Al- Baqarah 2:286)~

**“Kuncinya, selagi kita mau berusaha dan libatkan Allah dalam setiap langkah dan persoalan apapun!”.**

*“Letakan aku dalam hatimu, maka aku akan meletakkanmu dalam hati-Ku”.*

~(Q.S Al-Baqarah 2:152)~

**“Direndahkan dimata manusia, ditinggikan dimata Tuhan. *Prove Them Wrong, Gonna Fight and Don't Stop Until You're Proud*”**

### **Kupersembahkan kepada :**

1. Untuk Kedua Orangtuaku Tercinta
2. Kakak, Adik- Adik, Ipar dan Keponakanku Yang Kusayangi
3. Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti
4. Sahabat dan Teman Seperjuangan
5. Almamaterku

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Sari Yuliatwati  
NPM/Nomor Pokok : 2201120511.P  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi

Menyatakan bahwa skripsi ini telah ditulis dengan sungguh-sungguh dan tidak ada bagian yang merupakan penjiplakan karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan skripsi dengan segala konsekuensinya.

Palembang, September 2024



Sari Yuliatwati

## KATA PENGANTAR

Kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang efektif dan efisien. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal.

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal dapat mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan, sehingga dapat dijadikan acuan bagi pengambil kebijakan dalam mengelola keuangan daerah.

Dengan selesainya penelitian ini, penulis mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Edizal AE., MS. Selaku Rektor Universitas Tridinanti.
2. Ibu Dr. Msy. Mikial, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti.
3. Ibu Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti sekaligus selaku pembimbing pertama yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta pengarahan dan saran kepada peneliti selama menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Ibu Sasiska Rani, SE., M.Si selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan masukan, bimbingan serta pengarahan dan saran-saran kepada peneliti selama menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tridinanti yang telah memberikan bekal ilmu selama masa studi.
6. Orang tua dan saudara-saudara penulis yang telah memberikan semangat, kasih sayang dan perhatian serta dukungan moril, material dan doanya untuk penulis.

7. Diri sendiri atas ketekunan, dedikasi dan semangat yang tidak pernah padam dengan segala tantangan dan rintangan yang dihadapi dalam menyelesaikan penelitian ini.
8. Teman seperjuangan Meris Duwi Anggraini dan Ayuk Ratika yang telah memberikan dukungan dengan membantu menyediakan dan meminjamkan peralatan seperti laptop dan printer untuk menyelesaikan penelitian ini.
9. Sahabat dan teman seperjuangan Angkatan 2022 Transisi Universitas Tridinanti.

Semoga semua bantuan dan dukungan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi peneliti dan rekan-rekan yang akan menyusun skripsi.

Palembang, Juli 2024

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Kajian Teoritis .....	11
2.1.1 <i>Signalling Theory</i> .....	11
2.1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	12
2.1.2.1 Pengertian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	12
2.1.2.2 Tahap-Tahap Menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.1.2.3 Indikator Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	13
2.1.3 Pengukuran Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	14
2.1.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	21
2.1.3.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	21
2.1.3.2 Sumber – Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	22
2.1.4 Dana Perimbangan.....	24
2.1.4.1 Pengertian Dana Perimbangan .....	24
2.1.4.2 Jenis – Jenis Dana Perimbangan .....	25
2.1.5 Belanja Modal .....	26
2.1.5.1 Pengertian Belanja Modal .....	26
2.1.5.2 Jenis-Jenis Belanja Model.....	26
2.2 Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	28





4.2 Pembahasan .....	65
4.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	65
4.2.2 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	66
4.2.3 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	68
4.2.4 Pengaruh Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	69
 <b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	72
5.2 Saran .....	74
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	<b>77</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1.1 Opini BPK terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2021 .....	2
1.2 Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2022 .....	4
2.1 Kriteria Rasio Desentralisasi .....	16
2.2 Kriteria Rasio Ketergantungan Daerah .....	17
2.3 Kriteria Rasio Kemandirian Daerah .....	18
2.4 Kriteria Rasio Efektivitas .....	18
2.5 Kriteria Rasio Efisiensi .....	19
2.6 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	28
3.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	40
3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	43
4.1 Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan .....	52
4.2 Uji Statistik Deskriptif sebelum dikurangi Data <i>Outlier</i> .....	53
4.3 Uji Statistik Deskriptif setelah dikurangi Data <i>Outlier</i> .....	53
4.4 Uji Normalitas <i>Kolmogorov-Smirnov</i> setelah dikurangi Data <i>Outlier</i> ....	56
4.5 Uji Multikolinearitas .....	58
4.6 Uji Autokorelasi .....	59
4.7 Analisis Regresi Linear Berganda .....	60
4.8 Hasil Uji Signifikan Simultan (Uji F) .....	62
4.9 Hasil Uji Signifikan Individual (Uji Statistik t) .....	63
4.10 Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ) .....	64

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Skema Kerangka Berpikir .....	36
4.1 Uji Heteroskedastitas .....	57

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Data Pendapatan Asli Daerah, Total Pendapatan Daerah dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2022.....	77
2. Data Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dan Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2022 dan Rasio.....	78
3. Data Dana Perimbangan, Total Pendapatan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2022 dan Rasio .....	79
4. Data Belanja Modal, Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2022 dan Rasio.....	80
5. Data Sampel Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.....	81
6. Data Output SPSS .....	83
7. Lembar Persetujuan Revisi Skripsi .....	87
8. Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.....	88
9. Formulir TA 1 dan TA 2 .....	89
10. Kartu Konsultasi Skripsi .....	91
11. Lembar Pertanyaan dan Saran Ujian Skripsi .....	92

## ABSTRAK

**SARI YULIAWATI. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. (Dibawah bimbingan Ibu Meti Zuliyana, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS dan Ibu Sasiska Rani, SE., M.Si)**

Kemampuan pemerintah daerah dalam menerapkan aturan pengelolaan keuangan dengan benar dan efektif untuk memberikan layanan yang diinginkan adalah dengan melihat kinerja keuangan pemerintah daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019-2022. Pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal adalah tolak ukur dalam menilai kemandirian suatu daerah dalam penerapan desentralisasi fiskal.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif dan data sekunder berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari situs resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan dengan jumlah populasi sebanyak 17 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan non-probability dengan metode sampling jenuh. Analisis data yang digunakan yaitu regresi linier berganda

Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal secara bersamaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Untuk pengujian secara parsial mendapatkan hasil bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan dana perimbangan dan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

***Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah***

## **ABSTRACT**

**SARI YULIAWATI. *The impact of Regional Real Income (PAD), Balance Fund and Capital Purchases on the financial performance of the District/City Government in South Sumatra Province. (Dibawah bimbingan Ibu Meti Zuliyana, SE.,M.Si.,Ak.,CA.,CSRS dan Ibu Sasiska Rani, SE.,M.Si)***

*The ability of local governments to apply financial management rules correctly and effectively to provide the desired services is based on looking at the financial performance of local governments. The aim of this research is to find out whether local original income, balancing funds and capital expenditure have an effect on the financial performance of Regency/City regional governments in South Sumatra Province for the 2019-2022 budget year. Regional original income, balancing funds and capital expenditure are benchmarks for assessing the independence of a region in implementing fiscal decentralization.*

*This research uses quantitative data and secondary data in the form of regional income and expenditure budget realization reports sourced from the official website of the Directorate General of Fiscal Balance (DJPB) of the Ministry of Finance with a population of 17 regencies/cities in South Sumatra Province. The sampling technique in this research used non-probability with a saturated sampling method. The data analysis used is multiple linear regression*

*Simultaneous test results show that regional original income, balancing funds and capital expenditure simultaneously influence the financial performance of regional governments. For partial testing, the results show that local revenue has an influence on regional government financial performance, while balancing funds and capital expenditure have no effect on regional government financial performance.*

**Keywords: *Regional Real Income, Balance Fund, Capital Purchases, Financial Performance of the Regional Government***

## **RIWAYAT HIDUP**

**Sari Yuliawati**, dilahirkan di Ngulak pada tanggal 05 Juli 2000 dari Ayah Firdaus Suarsitas dan Ibu Dahlia. Ia anak kedua dari empat bersaudara.

Sekolah Dasar diselesaikan pada tahun 2012 di SDN 08 Ngulak, Sekolah Menengah Pertama diselesaikan pada tahun 2015 di Mts Al-Marhamah Ngulak dan selanjutnya menyelesaikan Sekolah Menengah Atas pada tahun 2018 di SMAN 1 Sangadesa dan melanjutkan Pendidikan Diploma III yang diselesaikan pada tahun 2021 di Politeknik Sekayu. Pada tahun 2022, ia melanjutkan pendidikan Strata 1 memasuki Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Tridinanti.

Palembang, 20 Juli 2024

Sari Yuliawati



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Otonomi daerah di Indonesia mulai berlaku sejak diberlakukannya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah pada tanggal 01 Januari 2001. Otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia memberikan kemandirian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dalam memanajemen sumber daya dan dana. Salah satu tujuan penerapan otonomi daerah adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayan publik serta kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan keuangan daerah yang baik.

Menurut Permendagri No.13 Tahun 2006 Keuangan daerah harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatuhan, dan manfaat masyarakat.

Jika pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, tentu hal ini dapat meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah serta memberikan manfaat yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Menurut Halim (2021:131) Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah ukuran yang menggambarkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan keuangan sumber daya keuangan oleh pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kinerja ini mencakup berbagai aspek seperti kemampuan mengelola pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan secara optimal, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana publik, yang akhirnya

berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik dan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara efektif.

Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat untuk menerapkan otonomi daerah. Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 13 Kabupaten dan 4 Kota dimana diharapkan dengan diterapkannya otonomi daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan dapat menggali potensi yang dimiliki daerahnya sehingga dapat mengurangi ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Berdasarkan data yang diperoleh dari website Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Sumatera Selatan. Berikut tabel opini BPK terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2021.

**Tabel 1.1**  
**Opini BPK terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2021**

No	Kabupaten/Kota	Opini BPK		
		2019	2020	2021
1	Kab. Lahat	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Musi Banyuasin	WTP	WTP	WDP
3	Kab. Musi Rawas	WTP	WTP	WTP
4	Kab. Muara Enim	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Ogan Komering Ilir	WTP	WTP	WTP PSH
6	Kab. Ogan Komering Ulu	WTP	WTP	WTP
7	Kota Palembang	WTP	WTP	WTP
8	Kota Prabumulih	WTP	WTP	WTP
9	Kota Pagar Alam	WTP	WTP	WTP
10	Kota Lubuk Linggau	WTP	WTP	WTP
11	Kab. Banyuasin	WTP	WTP	WTP
12	Kab. Ogan Ilir	WTP	WTP	WTP
13	Kab. OKU Timur	WTP	WTP	WTP
14	Kab. OKU Selatan	WTP	WTP	WTP
15	Kab. Empat Lawang	WTP	WTP	WTP
16	Kab. Penukal Abab	WTP	WDP	WTP PSH
17	Kab. Musi Rawas Utara	WTP	WTP	WTP PSH

Sumber: <https://sumsel.bpk.go.id> (data diolah, 2024)

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa ada 13 (tiga belas) Kabupaten/Kota yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) setiap tahun secara berturut-turut, 3 (tiga) Kabupaten yang mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan paragraf Penekanan Suatu Hal (WTP PSH) pada tahun anggaran 2021, yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Predikat WTP PSH menunjukkan pengelolaan keuangan daerah yang baik namun dengan catatan bahwa ada beberapa aspek yang memerlukan perhatian atau tindakan perbaikan untuk menjaga atau meningkatkan kualitas laporan keuangan dan tata kelola di masa depan. Selain itu ada 2 (dua) Kabupaten yang memperoleh predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP), yaitu Kabupaten Musi Banyuasin pada tahun anggaran 2021 dan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir pada tahun anggaran 2020.

Menurut Utami (2023) laporan keuangan daerah dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan pembuatan keputusan serta pengukuran dan evaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah, maka diperlukan analisis lebih lanjut terhadap laporan keuangan daerah. Karena, opini BPK terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Daerah tidak sepenuhnya mencerminkan baik atau buruknya kinerja keuangan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan perlu dinilai kembali menggunakan teknik analisis rasio keuangan. Ada beberapa rasio yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah. Salah satunya ialah rasio desentralisasi fiskal.

Rasio desentralisasi fiskal memberikan gambaran yang komprehensif tentang seberapa baik pemerintah daerah mengelola keuangan dan desentralisasi fiskal berkontribusi positif terhadap peningkatan kualitas layanan publik dan

pembangunan daerah. Rasio derajat desentralisasi fiskal dihitung dengan membagi pendapatan asli daerah dengan total pendapatan daerah. (Alfiani dkk. 2024)

Dengan presentase rasio desentralisasi fiskal dibawah dari 10%, daerah tersebut dalam kategori sangat kurang, presentase 10% - 20% menunjukkan kategori kurang, kategori sedang diberikan untuk rasio antara 20% -30%, rasio antara 30% - 40% dianggap cukup. Jika rasio berada diantara 40% hingga 50% daerah tersebut dikategorikan sebagai baik dan rasio yang mencapai atau lebih dari 50% menunjukkan kategori sangat baik". (Pasaribu dkk. 2021)

Berikut perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan tahun anggaran 2019-2022 dengan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal.

**Tabel 1.2**  
**Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2022.**

No	Kab/Kota	Kinerja Keuangan			
		2019	2020	2021	2022
1	Kab. Lahat	6.20%	6.56%	7.07%	6.50%
2	Kab. Musi Banyuasin	7.27%	10.00%	10.75%	10.94%
3	Kab. Musi Rawas	6.70%	9.38%	8.75%	7.56%
4	Kab. Muara Enim	9.87%	10.10%	8.78%	7.69%
5	Kab. Ogan Komering Ilir	7.91%	7.52%	7.03%	7.40%
6	Kab. Ogan Komering Ulu	9.02%	8.37%	7.17%	7.48%
7	Kota Palembang	27.11%	27.95%	31.40%	34.63%
8	Kota Prabumulih	8.27%	8.75%	8.01%	9.52%
9	Kota Pagar Alam	7.14%	10.29%	7.55%	7.20%
10	Kota Lubuk Linggau	9.80%	8.41%	13.42%	9.03%
11	Kab. Banyuasin	8.19%	9.12%	9.99%	9.65%
12	Kab. Ogan Ilir	5.28%	5.82%	7.04%	7.24%
13	Kab. OKU Timur	5.28%	4.77%	6.51%	4.77%
14	Kab. OKU Selatan	4.14%	3.45%	4.75%	3.69%
15	Kab. Empat Lawang	3.94%	3.16%	2.67%	3.48%
16	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	5.56%	5.02%	4.15%	3.72%
17	Kab. Musi Rawas Utara	3.69%	5.44%	5.26%	4.33%

Sumber : Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)(data diolah,2024)

Berdasarkan hasil perhitungan rasio derajat desentralisasi fiskal yang ditunjukkan pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa rata-rata kinerja keuangan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

Selatan berada pada nilai derajat desentralisasi fiskal dengan tingkat kemampuan keuangan daerah yang sangat kurang, karena berada pada interval dibawah 10%, dan hanya satu Kota yang berada pada nilai derajat desentralisasi fiskal dengan kemampuan keuangan daerah yang sedang, karena berada pada interval antara 20% - 30%, yaitu Kota Palembang.

Peningkatan dan penurunan kinerja keuangan Pemerintah Daerah dapat dikaitkan dengan beberapa faktor. Dalam penelitian ini faktor-faktor yang digunakan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Nasa (2023) dan Prastiwi dan Aji (2020) menentukan variabel pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal ada kaitannya terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Mengacu pada dua penelitian terdahulu, sehingga peneliti menentukan tiga faktor yang dapat dikaitkan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal.

Faktor pertama pendapatan asli daerah (PAD). Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. PAD adalah penerimaan daerah yang berasal dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah, yang bertujuan untuk memeberikan keluasan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Menurut penelitian Fransiska (2023), Febrianty dan Putra (2023), dan Putri dan Ratnawati (2023) menyatakan bahwa PAD berpengaruh secara positif

dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Nassa (2023) dan Mahadewi dan Indraswarawati (2023) yang menyatakan bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dana perimbangan. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari penerimaan APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi. Dana perimbangan terdiri atas dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dan dana bagi hasil (DBH). Tujuan dari dana perimbangan adalah untuk mengurangi perbedaan fiskal antara daerah, mendukung operasi pemerintahan, dan mendorong pemerataan pembangunan. Keberhasilan daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan dan pelayanan publik sangat dipengaruhi oleh bagaimana dana perimbangan digunakan (UU No. 33 Tahun 2004).

Terdapat perbedaan hasil penelitian tentang pengaruh dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Fransiska (2023), Putri dan Ratnawati (2023) dan Manafe dkk. (2021) yang menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nassa (2023), Mahadewi dan Indraswarawati (2023) dan Anggraeni (2020), yang mengatakan bahwa dana perimbangan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor ketiga yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dikeluarkan dalam rangka pengadaan barang ataupun pembangunan aktiva tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakup pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung pemerintahan, dan fasilitas lainnya. (PP No. 71 Tahun 2010).

Menjalankan belanja modal dengan cara yang efektif dan efisien sangat penting untuk menciptakan nilai tambah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan kata lain, belanja modal yang tepat sasaran akan memiliki dampak yang menguntungkan pada kinerja keuangan daerah.

Belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan daerah sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Fransiska (2023), Febrianty dan Putra (2023) dan Suandani dan Astawa (2021). Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Ati dkk. (2023), Jauhariah (2022) dan Prastiwi dan Aji (2020) mengatakan bahwa belanja modal tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan fenomena dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk meneliti **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019-2022”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Berapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Berapa besar pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Berapa besar pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal secara simultan terhadap Kinerja



Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;

2. Untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
3. Untuk mengetahui pengaruh Dana Perimbangan secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan;
4. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Modal secara parsial terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini bisa digunakan untuk mengembangkan model atau kerangka teori yang lebih komprehensif dalam memahami dinamika keuangan daerah. Hasil penelitian ini juga dapat memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian lebih lanjut dan pengembangan kebijakan yang relevan. Penelitian ini akan memberikan bukti empiris tentang bagaimana pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

1. Bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan

Diharapkan penelitian ini akan bermanfaat bagi pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan untuk digunakan sebagai masukan dan pertimbangan dalam mengambil kebijakan untuk meningkatkan kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan, belanja modal, dan kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota di provinsi Sumatera Selatan.

3. Bagi penulis selanjutnya

Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alfiani, A. dkk. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Kabupaten Bogor. *Journal of Business Innovation and Accounting Research*, 76-77.
- Banga, W. (2017). *Administrasi Keuangan Negara dan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. (2024). Profil Provinsi Sumatera Selatan.
- Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Sumatera Selatan. (2024). Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. (2024). *Data Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019-2022*. Jakarta.
- Febriansyah, A. (2021). Pengaruh Belanja Modal, Dana Perimbangan, Ukuran Pemerintah Daerah dan PAD Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota Di Provinsi Bangka Belitung. *Skripsi*, 14-15.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisa Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Edisi Ke Sembilan. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2021). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jauhariyah, M. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2014-2021 . *Skripsi*, 15-16.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (3 ed)* . Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Nuhhirto, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah dengan Kinerja Keuangan sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu . *Jurnal Akpem*, 23.
- Pasaribu, dkk. (2021). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu : Pendekatan Derajat Desentralisasi Fiskal. *Akuntabilitas*, 15(1), 137-154.
- Patarai, M. I. (2016). Kinerja Keuangan Daerah. *De la Macca*, 15.

- Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor PER-33/PB/2008 Tentang Pedoman Penggunaan Akun Pendapatan, Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.*
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Republik Indonesia. (2010). *Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.*
- Republik Indonesia. (2011). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 Tentang Klasifikasi Anggaran.*
- Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.*
- Sakaran, U. (2011). *Metodologi Penelitian Untuk Bisnis.* Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Sanusi, A. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis .* Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Sihombing, dkk. (2022). Identifikasi Data Outlier (Pencilan) dan Kenormalan Data Pada Data Univariat serta Alternatif Penyelesaiannya . *Jurnal Ekonomi dan Statistik Indonesia*, 307-316.
- Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. (2012). *Statistika Untuk Penelitian.* Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Suprpto, N. N. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara . *JRAK*, 287-302.
- Unanti, F. E. (2023). *Pedoman Penulisan Skripsi dan Laporan Akhir.* Palembang: Unanti Pers.
- Utami, M. H. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung Tahun Anggaran 2015-2021. *Skripsi*, 26-27

